

Politik Pengakuan akan Kesamaan dan Perbedaan

(Sebuah Tanggapan Atas Artikel Otto Gusti)

Oleh Yosef Keladu Koten

Abstract:

Artikel ini merupakan tanggapan yang melengkapi artikel Otto Gusti tentang “Politik Diferensiasi: Memahami Konsep Multikulturalisme Charles Taylor.” Charles Taylor sesungguhnya tidak berbicara secara khusus tentang multikulturalisme, tetapi hanya tentang politik pengakuan. Untuk itu, perlu dijelaskan konsep multikulturalisme itu sendiri. Tetapi, apakah pengakuan yang dimaksudkan di sini hanya sebatas pengakuan akan perbedaan? Tulisan ini coba memperluas politik pengakuan yang mencakupi juga pengakuan akan kesamaan dan bagaimana pengakuan itu dapat dicapai, khususnya oleh kultur-kultur minoritas.

Kata-kata Kunci: Multikulturalisme, politik pengakuan, politik martabat universal, politik perbedaan, dan identitas.

Pendahuluan

Penulis Otto Gusti, dalam artikelnya “Politik Diferensiasi: Memahami Konsep Multikulturalisme Charles Taylor,” menguraikan konsep politik multikulturalisme salah seorang filsuf politik kontemporer, Charles Taylor. Dalam terang pemahaman ini, penulis coba membaca pluralisme yang diajarkan dan dihidupi oleh salah seorang bapak bangsa kita Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Apa yang diuraikan penulis sangat menarik karena berbicara tentang situasi dunia kita yang semakin mengglobal dan multikultural sebagai konsekuensi dari makin banyak dan beranekaragamnya kultur yang ada bersama dalam sebuah negara. Topik ini juga aktual karena negara kita Indonesia, sejak berdirinya sudah berciri multikultural. Karena itu adalah tepat dan relevan kalau tema multikulturalisme dijadikan bahan diskursus untuk membantu kita membaca dan sekaligus merespons secara tepat fenomena multikulturalisme ini dalam realitas.

Apa itu Multikulturalisme?

Charles Taylor sesungguhnya tidak secara eksplisit menguraikan multikulturalisme ini. Dia hanya bertolak dari fakta multikulturalisme yang ada di Kanada dan Amerika Serikat (AS). Tetapi adalah lebih baik kalau term ini perlu dijelaskan lebih dahulu. Untuk ini, penulis menggunakan penjelasan dari dua multikulturalis zaman ini, yaitu Will Kymlicka dan Bhiku Parekh.

Will Kymlicka, dalam bukunya *Multicultural Citizenship*, menegaskan bahwa multikulturalisme mencakupi berbagai bentuk pluralisme budaya yang beranekaragam, yang memunculkan tantangan atau tuntutan yang berbeda-beda pula. Dengan bertolak dari fenomena yang ada di AS dan Kanada, dia membedakan dua bentuk multikulturalisme yang paling umum, yaitu multibangsa (*multination*) dan polietnik.¹ Bangsa secara sosiologis diartikan sebagai sebuah komunitas historis yang kurang lebih lengkap secara institusional, mendiami sebuah wilayah, memiliki bahasa dan budaya yang khas. Misalnya, di AS ada orang-orang Indian, Puerto Rico, dan lain-lain. Atau di Kanada, ada kelompok berbahasa Perancis di Quebec. Pada umumnya, kelompok-kelompok bangsa dalam sebuah negara ini diperoleh lewat kolonisasi atau penaklukan. Sementara bentuk kedua adalah polietnik, yang merupakan akibat dari adanya

¹ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*, Oxford: Clarendon Press, 1998, hlm. 11

migrasi. Individu-individu atau keluarga yang bermigrasi ke suatu negara lain diizinkan untuk mempertahankan beberapa kekhasan etnis mereka, seperti bahasa. Misalnya, orang-orang Latino atau Vietnam di AS.

Sedangkan Bhiku Parekh, dalam bukunya *Rethinking Multiculturalism*, mendefinisikan multikulturalisme sebagai keanekaragaman yang dilekatkan secara kultural. Dalam konteks ini, dia membedakan tiga bentuk multikulturalisme yang paling umum.² *Pertama*, keanekaragaman subkultural. Sekelompok orang menjalankan keyakinan dan praktik hidup yang relatif sangat berbeda dengan cara hidup konvensional atau yang dipraktikkan secara luas dan umum, seperti kaum gay dan lesbian. Kelompok ini tidak bertendensi untuk menjadi kelompok alternatif, dalam arti menggantikan pola hidup berkeluarga lama, tetapi hanya untuk menjadikan kebudayaan yang sudah ada plural. *Kedua*, multikulturalisme perspektif. Inilah kelompok yang kritis terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari budaya yang sudah ada, seperti kaum feminis, pencinta lingkungan hidup, dan lain-lain. Perspektif intelektual ditawarkan untuk meredefinisikan kebudayaan yang sudah ada. *Ketiga*, keanekaragaman komunal. Hal ini berkaitan dengan komunitas yang sudah sadar akan identitas diri mereka, terorganisasi secara baik, dan menjalankan keyakinan hidup yang berlainan.

Politik Pengakuan akan Kesamaan dan Perbedaan

Bagaimana menyikapi fenomena multikulturalisme tersebut di atas? Dengan menganalisis secara mendalam situasi di Kanada, khususnya di Quebec, Charles Taylor mengemukakan pentingnya pengakuan. Itulah yang dikenal dengan politik pengakuan (*the politics of recognition*). Dalam interpretasinya, Otto Gusti mereduksi politik pengakuan Taylor hanya sebatas pengakuan akan perbedaan (politik diferensiasi). Tetapi, apakah cukup tepat dan *fair* interpretasi ini?

Taylor mengatakan: “Wacana pengakuan menjadi biasa bagi kita pada dua level: *pertama*, dalam lingkungan yang intim, di mana kita memahami formasi identitas diri sebagai yang terjadi dalam sebuah dialog berlanjut dan perjuangan dengan *significant others*. *Kedua*, dalam lingkungan public, di mana pengakuan kesederajatan telah memainkan peranan yang lebih besar.”³ Level pertama pengakuan tampak dalam uraiannya tentang relasi antara formasi identitas diri/kelompok dengan pengakuan. Dan level kedua, tampak dalam uraian dalam bagian II, di mana dia menguraikan kesederajatan dalam ruang publik. Kesederajatan di ruang publik berkaitan erat dengan dua perubahan, yang melahirkan dua bentuk pengakuan berbeda. Perubahan pertama, dari konsep tentang hormat kepada martabat manusia, yang melahirkan politik martabat manusia, dan perubahan kedua berhubungan dengan perkembangan konsep modern tentang identitas, melahirkan politik diferensiasi.

Diskursus tentang pengakuan akan kesamaan muncul seiring dengan perkembangan konsep modern tentang martabat (*dignity*), yang digunakan dalam pengertian yang universal dan egalitarian, di mana martabat manusia atau martabat warga negara dianggap sebagai sesuatu yang inheren (bawaan). Martabat yang sama didasarkan pada ide bahwa semua manusia layak dihormati secara sama.⁴ Yang menjadi dasar kelayakan adalah potensi manusia yang universal atau kualitas-kualitas inheren yang disyeringkan oleh semua manusia. Misalnya, potensi atau kemampuan berpikir, memilih, dan bertindak karena semua manusia dianugerahi dengan intelek dan kehendak bebas. Kualitas-kualitas alamiah, yang ada secara potensial tersebut memungkinkan

² Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, penerj. Bambang Kukuh Adi, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008, hlm. 15-17

³ Charles Taylor, “The Politics of Recognition,” dalam Amy Gutmann (ed.), *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*, New Jersey: Princeton University Press, 1994, hlm. 37

⁴ *Ibid.*, hlm. 41

setiap manusia untuk memiliki dalam dirinya sendiri nilai moral dan sebuah perasaan intuitif tentang apa yang baik dan buruk. Pemahaman akan yang baik dan buruk bukanlah persoalan kalkulasi tetapi perasaan akan adanya sesuatu yang sama dalam diri masing-masing orang. Karena itu, setiap manusia adalah agen moral yang khas dan otentik.

Sebuah potensi harus diaktualisasikan. Ketika individu mengaktualisasikan segala potensinya, dia membentuk identitas diri, entah sebagai individu ataupun sebagai suatu kultur. Identitas diri menunjuk pada pemahaman pribadi-pribadi tentang siapa diri mereka serta apa yang menjadi karakter fundamental dan khas sebagai manusia. Identitas diri dikaitkan dengan sesuatu yang khas dan hanya ditemukan oleh individu itu sendiri. Konsep ini muncul bersamaan dengan ideal “*being true to myself*” (jujur dengan diri sendiri) dan cara berada yang khas. Jujur dengan diri sendiri berarti jujur dengan originalitas, sesuatu yang hanya bisa diartikulasikan dan ditemukan oleh diri sendiri. Dalam mengartikulasikannya, individu juga mendefinisikan diri sendiri. Ideal ini disebut oleh Charles Taylor sebagai “otentisitas” (*authenticity*).⁵ Otentisitas menuntut setiap anggota kelompok sosial tertentu untuk menemukan cara berada yang asli sebagai kelompok. Cara berada ini tidak dapat diperoleh lewat imposisi eksternal dari orang atau kelompok sosial lain, tetapi harus dihasilkan dengan cara kembali ke dalam diri, ke dalam kelompok sosial sendiri.

Dari sinilah munculnya perbedaan antara individu yang satu dengan individu-individu lainnya atau kultur yang satu dengan kultur-kultur lainnya. Karena itu, muncul ide tentang politik perbedaan (*politics of difference*). Politik perbedaan merupakan reaksi penolakan terhadap praktik-praktik yang mengabaikan dan meremehkan kekhasan identitas kelompok minoritas dan upaya untuk mengasimilasikan kekhasan tersebut ke dalam yang lebih dominan atau mayoritas. Dalam politik perbedaan, yang ingin diakui adalah identitas unik masing-masing individu atau kelompok dan kekhasan mereka dari orang-orang lain. Di sini, perlu adanya pengakuan akan sesuatu yang tidak disyeringkan secara komunal. Politik perbedaan menegaskan bahwa individu yang satu berbeda dari individu-individu lain, kelompok sosial yang satu berbeda dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa politik perbedaan menghendaki agar perbedaan-perbedaan atau kekhasan-kekhasan masing-masing orang atau kelompok dijadikan basis untuk perlakuan yang berbeda. Dengan ini diharapkan agar anggota kelompok minoritas akan mendapat hak-hak dan kekuasaan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain sehingga mereka bisa berada dan hidup secara otentik sesuai dengan nilai yang digali dari khasanah budayanya sendiri.

Di samping itu, seperti dikatakan oleh Steven Rockefeller, dalam komentarnya tentang politik pengakuan Taylor, dalam penelusurannya tentang originalitas liberalisme dalam pemikiran modern, Taylor sesungguhnya memperjelas peran transformatif dari multikulturalisme dan politik pengakuan akan perbedaan dan kesamaan, yang sesungguhnya sudah ada dalam tradisi liberal.⁶ Inti dari tradisi liberal—yang mengusung politik kesamaan martabat universal—adalah proses kreatif, metode transformasi sosial dan individual, yang dirancang untuk memungkinkan manusia mengejar pengejawantahan ideal universal, seperti kebebasan dan kesamaan. Politik martabat yang sama tidak hanya dimengerti sebagai hormat akan potensi universal manusia dalam setiap pribadi, tetapi juga terhadap nilai intrinsik dari kultur yang beranekaragam dalam dan melaluinya individu mengaktualisasikan kemanusiaannya dan mengekspresikan personalitas uniknya. Apa yang disyeringkan secara universal dalam kodrat manusia mengekspresikan dirinya dalam berbagai bentuk budaya yang berbeda-beda. Di sini, setiap budaya partikular—termasuk di dalamnya liberalisme—perlu dievaluasi secara kritis

⁵ *Ibid.*, hlm. 31

⁶ Steven C. Rockefeller, “Comment,” dalam Amy Gutmann (ed.), *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*, New Jersey: Princenton University Press, 1994, hlm. 87

dalam terang nilai dan potensi universal. Tujuannya adalah untuk menghormati identitas etnik dan mendorong tradisi budaya yang berbeda-beda untuk secara penuh mengembangkan potensi mereka demi pengekspresian ideal demokrasi kebebasan dan kesamaan, yang mengarah pada transformasi budaya.

Dari uraian tersebut di atas tentang formasi identitas dan originalitas politik pengakuan akan kesamaan dan perbedaan, tampak dengan jelas bahwa sekalipun menekankan perbedaan, Taylor tetap mengakui peran sentral politik kesamaan martabat universal. Charles Taylor sesungguhnya mencari sebuah bentuk liberalisme—yang menekankan politik kesamaan martabat manusia—yang cocok dengan konteks multikulturalisme. Berbeda dengan penganut lain tentang liberalisme yang secara ekstrim menilai bahwa politik kesamaan menghilangkan perbedaan budaya, Taylor justru menganggap bahwa politik kesamaan tidak ramah terhadap perbedaan karena politik kesamaan memberlakukan secara sama, tanpa kecuali setiap peraturan dan kecurigaan terhadap tujuan kolektif. Dia menilai bahwa solusi liberal itu tidak ramah terhadap perbedaan karena tidak mengakomodasi aspirasi anggota dari kelompok yang berbeda-beda, yaitu kelangsungan budaya (*cultural survival*).⁷ Liberalisme yang didukung Taylor adalah model liberalisme yang mengisinkan tujuan kolektif kelompok budaya partikular, seperti orang Kanada berbahasa Perancis di Quebec, untuk secara aktif didukung oleh pemerintah demi kelangsungan budaya (*cultural survival*).

Karena itu pengakuan di sini bukanlah sebatas pengakuan verbal bahwa mereka ada atau sekedar kehati-hatian dalam perlakuan terhadap mereka, tetapi sebuah pengakuan esensial, yang bertolak dari keyakinan mendalam bahwa mereka memiliki identitas diri yang otentik dan khas, entah sebagai individu ataupun kelompok, dan bahwa mereka mampu merumuskan sendiri sistem atau pola yang mengatur pola tingkahlaku mereka, entah di arena privat ataupun publik. Tuntutan adalah bahwa biarkan kebudayaan mempertahankan diri mereka sendiri dalam batasan yang masuk akal dan kesamaan nilai. Hal ini berarti bahwa kelompok-kelompok minoritas tidak hanya dibiarkan hidup, tetapi diakui memiliki keunggulan dan nilai moral tertentu.⁸

Dari uraian di atas, tampaknya Taylor mempromosikan pengakuan akan tujuan kolektif budaya tertentu demi kelangsungan kultural dengan pemberian otonomi khusus. Masalahnya, dengan otonomi khusus itu berkembanglah mentalitas separatis yang mengangkat identitas etnis melampaui identitas universal manusia. Lihat saja, ketika Aceh diberi otonomi khusus, mereka memberlakukan hukum syariat Islam. Akibatnya, demi mempertahankan kemurnian syariat Islam, setiap orang yang melanggar syariat Islam dihukum dengan cara-cara yang melanggar hak individu, seperti cambuk. Di sini, apa yang dicemaskan oleh Habermas—seperti dikutip Otto Gusti, bahwa tujuan kolektif budaya partikular terlepas dari kepentingan individu yang konkret, terwujud.

Formasi Identitas dan Pengakuan

Keanekaragaman menuntut adanya pengakuan. Pengakuan berkaitan erat dengan pembentukan identitas dan kepercayaan diri. Fakta historis membuktikan bahwa tidak adanya pengakuan ataupun pengakuan yang salah telah mendatangkan penderitaan mental atau memenjarakan orang dalam gambaran diri yang salah, distortif, dan reduktif. Kesalahpahaman dapat menghancurkan identitas dan kepercayaan diri orang sehingga kelompok tersebut tidak bisa mengambil keuntungan kalau kesempatan terbuka bagi mereka. Pada zaman kolonialisasi, negara penjajah menganggap negara-negara jajahan sebagai *uncivilized*, atau *inferior* yang berakibat pada adanya rasa rendah diri, bergantung, dan tidak berdaya dari pihak negara-negara jajahan. Dalam budaya patriarkal, kaum perempuan mengalami konsekuensi yang serupa. Inilah titik tolak diskusi Charles Taylor tentang politik pengakuan.

Persoalannya, bagaimana kelompok-kelompok minoritas itu memperoleh pengakuan? Tampaknya, Taylor beranggapan bahwa pengakuan itu diperoleh kalau kelompok dominan dapat diyakinkan secara rasional untuk mengubah pandangan tentang kelompok minoritas lewat

⁷ Charles Taylor, *op. cit.*, hlm. 60-61

⁸ *Ibid.*, hlm. 64

argumen intelektual dan seruan moral. Dia menekankan metode refleksi politis, filosofis dan yuridis, dan menolak pendekatan budaya. Hal ini dipertegas oleh Otto Gusti:

Kedua latarbelakang historis di atas melahirkan beberapa persoalan yang oleh Charles Taylor direfleksikan dari sudut pandang teori politik dan filsafat sosial. Pertama, refleksi politis, filosofis dan yuridis tentang hidup bersama dalam masyarakat multikultural ditandai dengan koeksistensi egaliter dan bukan dominasi budaya mayoritas atas budaya-budaya lainnya. Konsep ini menawarkan model penyelesaian konflik yang tidak bersifat etnosentris dan budaya solidaritas di tengah multikulturalisme.⁹

Apakah benar penyelesaian konflik untuk mendapatkan pengakuan tidak bersifat etnosentris, berpusat pada atau melibatkan budaya? Kenyataannya, pengakuan yang salah terhadap kelompok tertentu memiliki dasar kultural.¹⁰ Dalam analisis Bhiku Parekh, misalnya, pandangan yang melemahkan orang-orang hitam oleh orang-orang putih di AS, sebagian karena budaya rasis, sebagian karena legitimasi sistem dominasi, dan sebagian karena orang-orang hitam sendiri menunjukkan atau mempratikkan ciri-ciri yang dilekatkan kepada mereka. Karena itu pengakuan hanya mungkin dengan kritik tajam atas kebudayaan entah dominan maupun minoritas. Atau dengan kata lain, hormat dan keterbukaan terhadap semua budaya harus disertai dengan tantangan kepada semua budaya untuk meninggalkan nilai-nilai intelektual dan moral yang tidak konsisten dengan ideal kebebasan, kesamaan dan kerjasama terus menerus untuk mencari kebenaran dan kesejahteraan.

Taylor mengapresiasi makna ini ketika dia menggambarkan nilai dialog lintas budaya yang mentransformasi pemahaman manusia, yang mengantar kepada peleburan horizon. Sekalipun demikian, adalah sulit bahwa sebuah kelompok budaya akan terbuka terhadap transformasi jika ia sibuk dengan melindungi budayanya sendiri. Kontroversi seputar UU penodaan agama dan poligami terjadi karena masing-masing kelompok—entah kelompok pejuang hak asasi manusia ataupun kelompok pejuang kemurnian agama dan poligami—begitu sibuk dengan upaya untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai kelompoknya sendiri. Jadi, ada tegangan antara upaya Taylor untuk mempertahankan prinsip politik kelangsungan budaya dan dukungannya pada dialog lintas budaya. Kenyataan menunjukkan bahwa konflik muncul karena budaya dominan tidak terbuka terhadap kritik dan budaya minoritas tidak rela memperbaiki praktik-praktik yang dituduhkan atau dilekatkan kepada mereka. ***

Daftar Kepustakaan

Kymlicka, Will. *Multicultural Citizenship*. Oxford: Clarendon Press, 1998

Parekh, Bhiku. *Rethinking Multiculturalism*. Penerj. Bambang Kukuh Adi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008

Rockefeller, Steven C. "Comment." Dalam Amy Gutmann (ed.). *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton University Press, 1994

Taylor, Charles. "The Politics of Recognition." Dalam Amy Gutmann (ed.). *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton University Press, 1994

⁹ Otto Gusti Madung, "Politik Diferensiasi: Memahami Konsep Multikulturalisme Charles Taylor," makalah yang dipresentasikan dalam sebuah seminar di Ledalero, tanggal 1 Mei 2010, hlm. 4

¹⁰ Bhiku Parekh, *op. cit.*, hlm. 449

